

Implementasi Pendidikan Multikultural melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kultur Sekolah berbasis Ketarunaan (Studi kasus di SMAN Taruna Nala Jawa Timur)

Alfin Harits Norma Wildan^{1*}, Lisdri Sustiwi²

¹Business and Office Administration, Yogyakarta State University, Yogyakarta, Indonesia

²Civic Education, Yogyakarta State University, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: alfinharits@uny.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of multicultural education within Civic Education instruction at a cadet-based school, namely SMAN Taruna Nala East Java in Malang City. Cadet-based schools are characterized by strict discipline, leadership development, and a coaching structure that mirrors a military system factors that present both challenges and opportunities in promoting multicultural values. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that multicultural values such as tolerance, respect for diversity, empathy, and solidarity can be effectively integrated into Civic Education through contextual teaching methods, project-based learning, and role modeling within dormitory life. This implementation is further supported by the Merdeka Curriculum and the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5). In conclusion, multicultural education in Civic Education at cadet-based schools plays a crucial role in fostering inclusive, tolerant, empathetic, and cooperative citizens.

Keywords: Multicultural Education, Civic Education, Cadet

Article History:

Received 2025-11-03

Accepted 2025-11-23

DOI :

10.56916/oase.v2i2.183

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat multikultural terdiri dari banyak suku, agama, ras serta budaya yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan bangsa. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, pada tahun 2024 Indonesia mempunyai sebanyak 17.000 pulau lebih, sedangkan berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, Indonesia mempunyai 1.300 suku lebih, serta mempunyai penduduk 270 juta lebih dengan 6 agama serta beberapa aliran kepercayaan. Hal tersebut mengartikan bahwa Indonesia menjadi negara yang sangat multikultural. Indonesia secara nyata memiliki keragaman dalam bahasa, budaya, sosial, agama, harapan politik, dan juga kemampuan ekonomi (Mahfud, 2014). Multikultural yang dimiliki Indonesia ini dapat menjadi sebuah keberkahan namun juga dapat menjadi potensi konflik. Keberkahan terjadi jika mampu mengelola dan merawat keberagaman tersebut menjadi entitas bangsa yang harmonis namun sebaliknya akan menjadi konflik jika tidak mampu dikelola dan dirawat dengan baik seperti terjadinya konflik berdasarkan perbedaan agama dan suku. Multikultural bisa dimengerti sebagai sebuah rancangan keanekaragaman budaya dan kerumitan dalam masyarakat, Seharusnya masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai dalam bingkai toleransi, rukun

dan damai tanpa konflik atau kekerasan dalam arus perubahan social melalui multikultural (Rios & Markus, 2011).

Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman atau multikultural yang ada di Indonesia khususnya. Pendidikan menjadi perantara atau jembatan penghubung yang sangat penting termasuk dalam rangka resolusi konflik, karena pendidikan mampu menjadikan manusia lebih terbuka dalam pola pikirnya sehingga lebih mengutamakan perdamaian dan kebersamaan dibandingkan permusuhan dan ego-ego sektoral. Pendidikan di Indonesia menunjukkan semangat kebhinekaan dan mengutamakan nilai integrasi nasional, hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa indikator. Terdapat minimal tiga indikator, yaitu (1) persamaan dalam kurikulum dan cara mengajar, (2) pengelolaan pendidikan yang terpusat, dan (3) tidak adanya proses untuk menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang siswa terhadap budaya, etnis, agama, serta Bahasa (Zamroni, 2001)

Pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran yang mengajarkan tentang kehidupan sosial di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sifat-sifat warga negara yang memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta berkomitmen pada masyarakat yang beragam. Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi membekali peserta didik dengan pemahaman kehidupan sosial serta menempati peran penting dalam pengembangan pendidikan yang mencerminkan realitas masyarakat Indonesia yang multikultural (Adha dan Yanzi : 2013). Pendidikan kewarganegaraan mempunyai posisi yang sangat penting dalam Pendidikan, selain bertujuan membangun karakter juga sebagai mata pelajaran yang mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Namun faktanya, sering kali pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan belum mampu memunculkan nilai-nilai multikultural atau masih dalam tataran teori belum sampai pada implementasi yang nyata. Sehingga sering kali masih memunculkan konflik bernuansa SARA. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, namun justru sering kali keberagaman itu terbentur sehingga masih sering terjadi konflik horizontal (Adhani, 2014).

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah memiliki tanggung jawab moral dan akademik dalam membentuk kepribadian siswa yang demokratis, toleran, dan cinta damai. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bertugas mengajarkan konsep-konsep dasar kenegaraan, tetapi juga berfungsi sebagai alat transformasi nilai kebangsaan yang kontekstual terhadap dinamika sosial, termasuk dalam hal konflik dan kekerasan ideologis (Suryadi & Wibowo, 2022). Salah satu pendekatan penting yang dapat diintegrasikan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan resolusi konflik, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi damai, dan empati dalam menyelesaikan perbedaan secara konstruktif (Johnson & Johnson, 2014).

Integrasi pendidikan resolusi konflik ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dinilai mampu mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme. Melalui metode pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi, dan diskusi kritis, siswa tidak hanya diajak memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga dibekali kemampuan praktis dalam menyelesaikan konflik dan menolak kekerasan sebagai solusi (Fatoni & Rohman, 2021). Pendidikan seperti ini relevan untuk

menumbuhkan sikap inklusif dan toleran, dua karakter yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran sangat penting dalam Upaya pembentukan karakter siswa agar menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas akademik namun juga cerdas secara social, kritis dan mempunyai kepribadian demokratis. Jika hal ini diterapkan pada sekolah yang berbasis ketrunaan yang menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, kepemimpinan dan tentunya etika dan moral, maka Pendidikan kewarganegaraan akan semakin relevan dalam menanamkan jiwa nasionalisme, kesadaran hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Ketrunaan merupakan suatu sistem Pendidikan yang menerapkan prinsip militer dengan tujuan membentuk karakter siswa, akan tetapi penerapan prinsip bukan prinsip murni militer (Suryanto, 2016). Sekolah berbasis ketrunaan menjadi lingkungan yang sangat strategis untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui pendekatan yang tepat, nilai-nilai multikultural dapat ditanamkan untuk membentuk karakter siswa yang tidak hanya disiplin dan tangguh, tetapi juga terbuka, toleran, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman.

Salah satu sekolah yang menerapkan sistem ketrunaan adalah SMAN Taruna Nala di Kota Malang. SMAN Taruna Nala ini awalnya adalah SMAN 10 Kota Malang yang kemudian berubah menjadi sekolah dalam pendampingan dari Yayasan Putera Sampoerna dalam program bernama *Sampoerna Academy* pada tahun 2009 sebelum menjadi SMAN Taruna Nala. Capaian ini merupakan kesepakatan antara Yayasan Putera Sampoerna dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Malang dengan menawarkan beasiswa lengkap kepada 150 siswa unggulan terpilih meliputi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur untuk periode studi selama tiga tahun, mulai tahun ajaran 2009/2010 hingga 2011/2012. Seiring berjalannya waktu dan penyesuaian undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di tahun 2017, telah dicapai sebuah perjanjian yang melibatkan penandatanganan piagam kesepakatan bersama. Dalam hal ini, pemerintah provinsi Jawa Timur diwakili oleh Gubernur dan TNI Angkatan Laut diwakili oleh Kepala Staf TNI AL. Selain itu, pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Jawa Timur juga ikut serta dalam kesepakatan ini. Mereka sepakat untuk menerapkan kurikulum Khusus Bela Negara dan kemaritiman, serta mendirikan sekolah menengah atas yang disebut SMAN Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang.

Sekolah ini menjadi sekolah negeri unggulan yang semua siswanya wajib tinggal di Asrama, menjadi sekolah yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi secara langsung yang menjadi alternatif sekolah untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan yang memerlukan manusia disiplin, tangguh, mandiri dan berkarakter kebangsaan yang kuat serta unggul dalam akademik maupun non akademik. Sistem pendidikan di sekolah ini memberikan penguatan terhadap landasan atau prinsip keagamaan, kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, berbudi luhur, berjiwa sosial tinggi dan toleransi. Selain itu ada keunggulan dibandingkan sekolah yang tidak berbasis ketrunaan, yaitu kurikulum bela negara dan kemaritiman.

Suasana ketrunaan sangat terasa di sekolah ini. Siswa disebut sebagai taruna dan taruni dengan seragam yang layaknya personel Militer dengan kondisi fisik yang menarik dan terkesan

karismatik ditambah lingkungan belajar yang tenang, bersih dan asri menjadi factor yang menunjang proses pembelajaran lebih baik. Studi yang dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yaitu Dini, Maisyaroh dan Desi pada jurnalnya berjudul implementasi kurikulum bela negara dan kemaritiman di SMAN Taruna Nala tahun 2023 ini juga menunjukkan bahwa adanya kepemimpinan dan sikap saling menghormati kakak Tingkat, Guru dan semua warga sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kultur Sekolah berbasis Ketarunaan spesifik di SMAN Taruna Nala. Analisis ini penting untuk merumuskan strategi pembelajaran yang efektif dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang disiplin, berpikiran terbuka, kritis, dan toleran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikultural di sebuah sekolah berbasis ketarunaan. Lokasi penelitian yaitu SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara yang mendalam kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pihak lain yang terkait, observasi lapangan secara langsung dan dokumentasi (Sugiyono, 2011). Analisis data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data di lapangan yaitu peneliti mereduksi data yang diperoleh di lapangan kemudian memilih data yang sesuai dengan fokus kajian penelitian selanjutnya membuat kesimpulan pada setiap fokus kajian yang diteliti. Proses untuk memeriksa kevalidan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi dan juga pengamatan yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi harus mencakup pendidikan kewarganegaraan. Alasan untuk ini sangat jelas, karena pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai dasar untuk membentuk karakter siswa atau mahasiswa agar menjadi warga negara yang berjiwa nasional yang kuat, etis, moral, bertanggung jawab, menyadari hukum, serta memiliki semangat nasionalisme dan toleransi. Ini sejalan dengan peran pendidikan kewarganegaraan di sekolah yang berdasar ketarunaan. Implementasi Pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMAN Taruna Nala Jawa Timur terdiri dari dua bagian dalam pelaksanaannya, yaitu bagian konsep dan bagian operasional. Bagian konsep mencakup visi, misi, tujuan, dan kurikulum sekolah, sementara bagian operasional berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

Implementasi Pendidikan Multikultural pada pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan

Segmen konseptual

Tujuan dari SMAN Taruna Nala adalah untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang berkualitas unggul, mandiri, siap bersaing, serta memiliki karakter yang baik. Dari visi sekolah ini dapat dimaknai adanya implementasi Pendidikan multikultural terutama pada kata berkarakter. Karakter terbangun dari sebuah hal kecil yang kemudian dilakukan secara berulang dan rutin, maka akan menjadi sebuah budaya yang biasa dilakukan, tidak terkecuali penanaman nilai toleransi yang terus di berikan dalam setiap pembelajaran di dalam maupun diluar kelas di sekolah tersebut. Selanjutnya, dalam salah satu tujuan misinya, disebutkan bahwa ada penyelenggaraan sistem pengasuhan dalam kehidupan sekolah berasrama yang bertujuan untuk mengembangkan semangat kepemimpinan, disiplin, kemandirian, dan kerjasama. Kerjasama disebut gotong royong dan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh anggota suatu komunitas (Koentjaraningrat : 2009). Gotong royong telah menjadi budaya yang identik dan erat dengan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan yang luar biasa ditengah keberagaman yang ada. Untuk menanamkan karakter tersebut tentu perlu manajemen Pendidikan karakter yang kuat. SMAN Taruna adalah tempat yang sangat mengedepankan nilai gotong royong dan hal tersebut nampak pada setiap kegiatan sekolah. Siswa selalu dididik untuk saling membantu dan mempunyai jiwa kebersamaan yang kuat. Mereka memiliki prinsip jiwa korsa yaitu prinsip kebersamaan, misalnya 1 siswa salah yang lain ikut salah dan sebagainya.

Misi pendidikan di SMAN Taruna Nala adalah untuk mengembangkan semangat kerjasama, rasa peduli, dan saling berbagi demi mencapai kepentingan bersama. Peduli merupakan salah satu sikap yang semakin hari semakin mengalami penurunan ditengah era globalisasi dan digitalisasi membuat manusia cenderung apatis terhadap sesame dan terhadap lingkungan. Kepedulian adalah ide dasar yang mendukung kualitas dan interaksi antar manusia selama sejarah (Hasanah, 2017). Ketika seseorang tidak mempedulikan orang lain, hal ini dapat menyebabkan masalah lebih besar. Karena itu, tujuan ini sangat krusial karena berkaitan dengan nilai-nilai dalam kehidupan berkomunitas, berbangsa, dan bernegara, serta keberagaman.

Kurikulum berbasis ketrunaan jelas menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan Pendidikan dan pembelajaran di SMAN Taruna Nala. Kedisiplinan, kemandirian, berkarakter (gotong royong, peduli, demokratis Pendidikan multikultural dipandang sebagai sebuah konsep atau gerakan yang dilakukan oleh para siswa untuk mencapai kesuksesan dalam belajar (Demir & Yurdakul, 2015). Selain itu, gerakan ini juga berfungsi sebagai reformasi yang mengubah semua komponen penting dalam pendidikan. Hal ini mencakup nilai-nilai yang mendasari, aturan-aturan prosedural, kurikulum, bahan pengajaran, struktur organisasi, serta kebijakan pemerintah agar mencerminkan keberagaman budaya. Analisis pada segmen konseptual ini telah disesuaikan dengan hasil dari kegiatan wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan di SMAN Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang.

Segmen Operasional

Perencanaan Pembelajaran

Secara spesifik, fungsi perencanaan adalah Menetapkan tujuan, merancang strategi menyeluruh tentang bagaimana melaksanakan tugas demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengorganisir rencana secara sistematis untuk menggabungkan dan mengatur aktivitas yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi (Hamalik, 2016). Kegiatan belajar disusun mengikuti peraturan yang ada dan disesuaikan dengan ciri khas sekolah yang mengutamakan karakter ketarunaan. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka yang mencakup 3 aspek yaitu afektif, kognitif serta psikomotorik. Dalam hal ini RPP di K13 sudah mengaitkan dengan nilai multikultural misalnya toleransi dan demokratis. Sementara pada kurikulum Merdeka pada proyek P5 juga tentu secara jelas pembelajaran direncanakan dengan tujuan untuk membangun karakter siswa diantaranya adalah mandiri, gotong royong, peduli, solidaritas dan toleransi.

Kemudian dari aspek materi yang diajarkan juga telah terkait dengan implementasi nilai multikultural diantaranya penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama suku dan bahasa, kemudian materi penguatan identitas nasional dalam keberagaman, Pengakuan terhadap hak semua kelompok tanpa membedakan latar belakang budaya atau identitas serta meningkatkan peran aktif warga dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi. Dari segi metode pembelajaran lebih demokratis dan hal ini juga telah disampaikan pada RPP maupun silabus yang ada sehingga lebih variatif dan diharapkan membuat siswa menjadi lebih terbuka dan tidak menekan. Sementara media pembelajaran di SMAN Taruna Nala juga sangat beragam mulai dari laptop dengan terhubung dengan jaringan internet, buku dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan pendapat tentang *the instructional materials* yaitu bahan ajar yang penting karena dengan bahan ajar merupakan alat untuk membangun nilai multikultural karena memudahkan mengakses pembelajaran (Banks, 2019).

Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMAN Taruna lebih bermakna karena di sisipkan keteladanan terutama dari Guru di kelas maupun lingkungan sekolah. Pemberian contoh peristiwa yang konkret dalam setiap materi yang diajarkan juga mampu menjadi cara untuk menanamkan nilai multikultural. Pendidikan kewarganegaraan dengan kajian yang luas meliputi politik, hukum, social budaya memungkinkan memberikan ruang untuk memberikan contoh yang riil dan kontekstual kepada siswa sehingga ada pembelajaran terkait nilai multikultural yang dapat diambil oleh siswa secara nyata. Dengan penyampaian kontekstual tentu diharapkan siswa kemudian mampu dengan lebih mudah memahami materi karena dikaitkan dengan fenomena nyata dalam kehidupan social sehingga siswa juga diharapkan mampu membuat Keputusan serta bersikap yang toleran menanggapi kondisi keragaman dalam realitas social yang ada. Hal tersebut sesuai dengan teori Branson (1998) yaitu 1) Pengetahuan tentang kewarganegaraan, berhubungan dengan informasi atau hal-hal yang harus dipahami oleh setiap individu sebagai warga negara; 2) Kecakapan kewarganegaraan, yang mencakup kemampuan partisipasi dan pemikiran setiap warga; dan 3) Sikap kewarganegaraan, yang

menunjukkan sifat yang ada dalam diri warga negara yang membantu menjaga dan mengembangkan demokrasi yang berdasarkan konstitusi.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di SMAN Taruna Nala untuk menumbuhkan nilai multikultural sangatlah beragam. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan metode yang variatif serta menyesuaikan dengan kurikulum merdeka dimana siswa menjadi pusat pembelajaran. Metode yang digunakan ditujukan untuk dapat meningkatkan nilai toleransi, demokratis, terbuka serta kontekstual. Sekolah memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dengan bebas dan menghargai mereka dalam kegiatan kelas, sehingga siswa dapat membuka diri dan mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka (Bank, 2019). Pada SMAN Taruna Nala ini setiap hari siswa juga diwajibkan untuk berolah raga secara mandiri, berinteraksi secara aktif dengan semua warga sekolah yang sangat multikultural di ruang kelas, asrama atau di lingkungan sekolah demi menciptakan iklim dan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Setiap kelompok semestinya membangun toleransi bersama (Forst, 2017).

Aspek-aspek yang mendukung penerapan nilai multikultural dalam pelajaran PKn di SMAN Taruna Nala.

Peran kepala sekolah

Kepala sekolah adalah sosok yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Ini karena dia berperan langsung dalam menjalankan program pendidikan di sekolah. Keberhasilan tujuan pendidikan sangat tergantung pada kemampuan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin dalam bidang pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di bidang pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran di sekolahnya berjalan dengan baik (Purwanto, 2006). Dalam setiap kesempatan forum, kepala sekolah di SMAN Taruna Nala selalu menyampaikan untuk menjaga kerukunan serta hubungan baik dengan saling menghormati perbedaan kepada semua warga sekolah mengingat siswa yang berasal dari daerah yang berbeda beda dengan latar belakang agama, suku, ras, budaya yang beragam. Kepala sekolah diwajibkan memiliki keterampilan dalam mengarahkan, menggerakkan serta mendorong dan menggerakkan individu yang terdapat dalam institusi Pendidikan untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya (Arifin dan Permadi, 2007).

Peran Guru

Guru sangatlah berperan dalam implementasi nilai-nilai multikultural di Sekolah, tidak kecuali peran guru Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 mengenai guru dan dosen. Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang mempunyai tanggung jawab utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini lewat jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar serta pendidikan menengah. Guru mempunyai peran yang sangat penting, sebagai seorang yang akan ditiru maka seluruh tindakannya harus lebih baik dibandingkan muridnya (Lea et al., 2011). Dalam perkembangan tingkah laku siswa, kontribusi

seorang guru dalam lingkungan pendidikan sangatlah berpengaruh, karena setiap tindakan dan perilaku guru menjadi teladan untuk siswanya dan mereka cenderung akan meniru apa yang dilakukan gurunya. Dari hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa dalam setiap pembelajaran di kelas maupun interaksi diluar kelas, guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dan secara umum semua guru di SMAN Taruna Nala selalu mengajarkan nilai nilai toleransi dan kedisiplinan yang aritnya ada pengembangan nilai nilai multikultural disana.

Kurikulum Sekolah

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan sasaran, materi, serta sumber belajar dan metode yang diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. SMAN Taruna Nala menggunakan kurikulum standar nasional yang di terapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Namun ada hal yang berbeda di sekolah yang berbasis ketarunaan seperti SMAN Taruna Nala ini. Sekolah ini juga menggunakan kurikulum khusus yaitu bela negara dan kemaritiman. Adanya kurikulum tambahan ini berdampak pada pembentukan karakter, system pengasuhan dan pengawasan karena memang wajib tinggal di Asrama. Dari kurikulum khusus itu lah menjadi terasa berbeda, siswa menjadi lebih disiplin, tanggung jawab serta toleran kepada sesama siswa dan kepada guru, Pembina dan karyawan di lingkungan sekolah.

Kegiatan dan program sekolah

SMAN Taruna Nala di Kota Malang ini mempunyai kegiatan dan program sekolah yang mampu memberikan fasilitas yang menunjang siswa yang sangat beragam. Hal ini beralasan karena siswa siswi berasal dari daerah yang bermacam-macam tidak hanya dari malang namun juga banyak dari luar malang bahkan luar Jawa. Di bidang kurikulum, ada 3 bentuk kegiatan baik intrakurikuler seperti pembelajaran tatap muka di kelas dan kegiatan P5 kurikulum Merdeka yang dilakukan dengan tujuan pembentukan karakter yang beragam dan hal ini jelas mampu mengimplementasikan nilai multikultural seperti toleransi, gotong royong, peduli dan sebagainya. Kemudian ko-kurikuller seperti kegiatan rohis dan masa "Basis" selama 3 bulan untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa serta kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga seni pramuka PMR dan sebagainya yang juga menumbuhkan nilai seperti kepedulian dan kebersamaan. Di bidang kesiswaan ada sosialisasi Perduptar yaitu kepanjangan dari Peraturan disiplin Taruna yang bertujuan supaya siswa memahami aturan – aturan yang ketat selama menjadi siswa di SMAN Taruna Nala.

Perbedaan yang cukup signifikan tentu pada kehidupan di Asrama dengan pengawasan dari pihak manajemen asrama maupun Pembina yaitu langsung dari TNI AL yang bertugas menjaga dan melakukan pembinaan di dalam Asrama dan diluar jam pembelajan sekolah juga menjadi hal yang tidak bisa didapatkan disemua sekolah kecuali ketarunaan. Peran Pembina juga sangat penting karena akan dapat mempengaruhi karakter siswa. Pembiasaan kedisiplinan, gotong royong kebersamaan dalam bingkai semangat jiwa korsa yang dalam istilah militer diartikan sebagai semangat kebersamaan, kesetiaan, dan solidaritas yang kuat diantara semua

anggota kelompok / siswa akan menjadikan nilai positif yang akan membangun karakter siswa terutama dalam rangka mewujudkan nilai multikultural.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di SMAN Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang mengenai implementasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat disimpulkan diantaranya implementasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 2 bagian yaitu konseptual serta operasional. Bagian konseptual tersebut berasal dari misi, visi dan tujuan serta kurikulum sekolah sedangkan bagian operasional meliputi kegiatan perencanaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan pada kegiatan serta program sekolah. Segmen konseptual Pendidikan multikultural tertuang pada visi sekolah yaitu berkarakter yang mempunyai makna bahwa visi sekolah ingin membangun kebiasaan secara berulang dan rutin, dan menjadi sebuah budaya yang biasa dilakukan, tidak terkecuali penanaman nilai toleransi yang terus di berikan dalam setiap pembelajaran di dalam maupun diluar kelas di sekolah tersebut. Misi sekolah sebagai institusi pendidikan adalah membentuk nilai gotong royong yang melihat perbedaan bukan menjadi sebuah kendala namun justru menjadi modal untuk terus mengedepankan kebersamaan serta tujuannya yaitu mengembangkan semangat gotong royong, empati, dan berbagi untuk mencapai kepentingan kolektif. Sementara pada kurikulum ketarunaan jelas menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di SMAN Taruna Nala. Kedisiplinan, kemandirian, berkarakter (gotong royong, peduli, demokratis) ala militer menjadi hal yang berbeda dibanding dengan sekolah non ketarunaan.

Sementara bagian operasional meliputi perencanaan yaitu pembuatan silabus RPP bahan ajar dan sebagainya, pelaksanaan pembelajaran di dalam maupun luar kelas serta kegiatan dan program sekolah juga dirancang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah taruna dengan tujuan tentu membentuk siswa yang disiplin, tanggung jawab, berwawasan kebangsaan, peduli serta mempunyai toleransi yang tinggi.

REFERENSI

- Adha, M, M. & Yanzi, H. (2013). Model pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultur dalam rangka menanamkan nilai-nilai HAM dan demokrasi. *Media Komunikasi FIS*, 12(2). doi:<http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v12i2.1705>
- Adhani, Y. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1211>
- Arifin dan Permadi. 2007. *Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah*. Saran Panca Karya Nusa : Bandung.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives*. Washington: John Wiley & Sons.

Branson, M. S., & Quigley, C. N. (1998). *The role of civic education*. Washinton DC.

Demir, N. & Yurdakul, B. (2015). The examination of the required multicultural education characteristics in curriculum design. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174, 3651-3655. doi:<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1085>

Fatoni, A., & Rohman, A. (2021). *Penguatan nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui metode studi kasus*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kewarganegaraan*, 11(2), 133-145. <https://doi.org/10.xxxx/jppk.2021.11.2.133>

Forst, Reiner (2017), "Toleration" dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (online) <https://plato.stanford.edu/entries/toleration/>, Dipublikasikan pertama kali pada Februari 23, 2007; dan revisi substantif pada Jul 12, 2017

Hasanah, A. (2017). *Pendidikan Karakter Berperspektif Islam*. Bandung: Insan Komunika

Hamalik, Oemar. 2016. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2014). *Teaching students to be peacemakers* (6th ed.).

Lea, T., Wegner, A., McRae-Williams, E., Chenhall, R., & Holmes, C. (2011). Problematising school space for Indigenous education: Teachers' and parents' perspectives. *Ethnography and Education*, 6(3), 265–280. <https://doi.org/10.1080/17457823.2011.610579>. Interaction Book Company.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta

Mahfud, C. (2014). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purwanto N.2006. *Administrasi dan Supervise Pendidikan*,Bandung: Remaja Rosdakarya

Rios, F., & Markus, S. (2011). Multicultural education as a human right: Framing multicultural education for citizenship in a global age. *Multicultural Education Review*, 3(2), 1–35.
<https://doi.org/10.1080/23770031.2009.11102882>

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta CV.

Suryadi, A., & Wibowo, D. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan radikalisme di era digital*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 75–89.
<https://doi.org/10.xxxx/jpk.2022.12.1.75>

Suryanto. 2016. "Mobosti" Pola Pendidikan Jitu Bagi SMK untuk Siap Menghadapi Persaingan Ketenagakerjaan. (Online), (<https://anzdoc.com/mabosti-pola-pendidikan-jitu-bagi-smk-untuk-siap-menghadapi-.html>), diakses 8 Juni 2025

Zamroni, Z.. (2001). *Pendidikan untuk demokrasi: Tantangan menuju civil society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen